

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara sejak akhir tahun 2019 telah menurunkan kinerja perekonomian global maupun nasional pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi akibat adanya penurunan aktivitas seluruh pelaku perekonomian dikarenakan pembatasan dalam hal mobilitas maupun interaksi secara langsung untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Tren pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkontraksi tampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 2,07 persen (c-to-c) pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019, pertumbuhan perekonomian Indonesia relatif lebih baik sehingga mampu mencapai hingga 5,02 persen. (BPS, 2022)

Pertumbuhan perekonomian sering dikaitkan dengan tinggi-rendahnya aktivitas perekonomian pada suatu wilayah. Umumnya, kondisi makro ekonomi negara berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur negara bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir cukup tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur, terutama pada masa pandemi COVID-19. (Sembayang, 2011) Berdasarkan RPJMN 2020-2024 yang telah disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025, pemerintah ingin memfokuskan pada kualitas SDM Indonesia yang mandiri dan mampu bersaing tanpa meninggalkan pembangunan di berbagai bidang yang ditekankan pada infrastruktur yang unggul di berbagai daerah.

Tidak meratanya pembangunan infrastruktur daerah menjadi salah satu fokus pemerintah sebagai langkah menuju pembangunan SDM di Indonesia. Situasi dengan penuh ketidakpastian ini menyebabkan perlambatan pembangunan sehingga pemerintah pusat harus mengeluarkan terobosan baru agar daerah mampu melaksanakan kewenangannya, khususnya akibat penurunan penerimaan pajak maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (Pinjaman PEN Daerah) merupakan bentuk bantuan pinjaman keuangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional untuk menanggulangi dampak dari Pandemi COVID-19. Pemerintah telah menetapkan PMK 179/2020 sebagai perubahan atas PMK 105/2020 mengenai pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah tahun 2020. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari PP 43/2020 dengan perubahan atas PP 23/2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam mengatasi ancaman stabilitas perekonomian dan keuangan nasional sebagai dampak Pandemi COVID-19.

Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah berupaya melakukan pemulihan perekonomian dengan memandatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai alat fiskal untuk kebijakan ekspansif pemerintah dengan memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan. Pinjaman PEN daerah menjadi dukungan kepada pemerintah daerah yang disalurkan melalui PT SMI (Persero) baik dalam bentuk pinjaman program maupun pinjaman

kegiatan. PT SMI akan menyediakan dua bentuk pengelolaan pinjaman dan yang akan dibahas pada KTTA ini adalah pinjaman yang bersumber dari APBN pada tahun 2020. Merujuk pada PMK 105/2020, dalam mendapatkan pinjaman PEN daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pertama, wilayah perlu terkena dampak pandemi COVID-19. Kedua, adanya program atau kegiatan daerah yang mendukung program PEN. Ketiga, akumulasi dari sisa dan jumlah pinjaman yang ditarik tidak boleh melebihi 75 persen dari penerimaan APBD tahun sebelumnya. Keempat, daerah harus memenuhi kuota kapasitas keuangannya agar dapat membayar kembali minimal 2,5 persen dari pinjaman daerah.

Pinjaman PEN daerah ini menjadi suatu terobosan baru pinjaman dengan bunga yang murah dan proses yang cepat, namun dengan pagu terbatas. Pinjaman ini dapat diberikan dengan melakukan pengajuan surat permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan kepada pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan dan kriteria terkait. Jika permohonan disetujui maka akan dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Pinjaman antara Kementerian Keuangan dan PT SMI. Perjanjian ini berisikan kesepakatan Pinjaman PEN Daerah yang bersumber dari pemerintah dan Pinjaman Dukungan PEN yang bersumber dari PT SMI. Selanjutnya PT SMI akan mengajukan permohonan pencairan dana kepada KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah yang kemudian akan diproses lebih lanjut.

PT SMI yang dimandatkan *Special Mission Vehicle* (SMV) berperan

dalam mengedepankan kebijakan pemerintah dengan melakukan penyaluran Pinjaman PEN Daerah. (SMV Kemenkeu, 2022) Oleh karena itu, hal ini menjadi tugas PT SMI untuk mengatur bagaimana proyek atau kegiatan yang dilakukan PT SMI dapat mengarahkan pemerintah daerah dan pihak lainnya untuk menerapkan perekonomian berkelanjutan sehingga pinjaman yang disalurkan dapat digunakan secara optimal. Untuk mengurangi beban pemerintah daerah, pengembalian pinjaman juga diperhitungkan langsung terhadap Dana Transfer Umum (DTU) sesuai dengan PMK 105/2020.

Dari penjelasan yang sudah disampaikan, penulis berkeinginan untuk menganalisis pelaksanaan penyaluran penerusan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Analisis ini dilakukan agar mengetahui manfaat yang didapatkan oleh daerah dalam rangka melakukan Pinjaman PEN Daerah. Penelitian diharapkan dapat membahas apakah pemberian pinjaman dalam rangka PEN daerah menjadi investasi yang tepat sekaligus efektif dalam melakukan pemulihan ekonomi. Hasil analisis penulis akan disusun dalam dengan judul “Analisis Penyaluran Penerusan Pinjaman PT SMI Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesesuaian antara kebijakan yang berlaku dengan pelaksanaan penerusan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur tahun 2020?
2. Bagaimana pengaruh Pinjaman PEN Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tahun 2020?

3. Bagaimana PT Sarana Multi Infrastruktur mengoptimalkan penyaluran Pinjaman PEN Daerah tahun 2020?
4. Bagaimana pelaksanaan pengembalian Pinjaman PEN Daerah oleh PT SMI kepada pemerintah pusat?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Menganalisis kesesuaian kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan penerusan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur tahun 2020.
2. Menganalisis pengaruh Pinjaman PEN Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tahun 2020.
3. Menganalisis bagaimana PT Sarana Multi Infrastruktur mengoptimalkan penyaluran Pinjaman PEN Daerah tahun 2020.
4. Mengidentifikasi pelaksanaan pengembalian Pinjaman PEN Daerah oleh PT SMI kepada pemerintah pusat tahun 2020.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam pembahasan KTTA ini, penulis akan berfokus pada analisis atas investasi pemerintah berupa dalam bentuk pelaksanaan Pinjaman PEN daerah dari PT SMI kepada pemerintah daerah tahun 2020. Analisis akan dilakukan pada kesesuaian ketentuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan penyaluran di lapangan dengan aspek berupa realisasi serta target penyaluran pinjaman, serta pengembalian pinjaman pokok kepada pemerintah pusat.

## 1.5 Manfaat Penulisan

### a) Bagi Penulis

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini menjadi ruang untuk mengetahui implementasi dari pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi dalam bidang pengelolaan investasi pemerintah khususnya pada pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dalam memulihkan perekonomian Indonesia melalui PT SMI sehingga menambah wawasan penulis.

### b) Bagi Akademik

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan analisis terkait rumusan masalah lebih lanjut terkait Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini. Pinjaman PEN Daerah. KTTA ini akan disimpan di perpustakaan Politeknik Keuangan Negara STAN.

### c) Bagi Pemerintah Daerah

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat menginformasikan manfaat lebih lanjut Pinjaman PEN Daerah kepada pemerintah daerah terhadap pertumbuhan perekonomian daerah tersebut, sehingga mereka dapat melakukan pengelolaan pinjaman yang lebih baik untuk pembangunan daerah sehingga terwujudnya pemulihan perekonomian daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional yang lebih baik melalui PT SMI.

### d) Bagi Pembaca

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dapat menjadi bacaan yang menambah pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai proses pengelolaan investasi pemerintah khususnya pada kebijakan pengelolaan investasi pemerintah dalam rangka menangani dampak Pandemi COVID-19 melalui pemerintah daerah.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum dari KTTA yang penulis susun, dimulai dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika dalam penulisan KTTA.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjabarkan mengenai konsep dasar dari investasi pemerintah dan pinjaman PEN daerah. Uraian pembahasan terdiri dari empat landasan teori yaitu teori mengenai Pinjaman PEN Daerah yang dilaksanakan oleh PT SMI yang dibagi ke dalam beberapa subbab yaitu konsep dasar investasi pemerintah, konsep dasar infrastruktur Indonesia, konsep dasar pinjaman daerah, konsep dasar program PEN dan lebih jauh tentang Pinjaman PEN Daerah itu sendiri.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjabarkan terkait metode pengumpulan data, informasi umum terkait objek penulisan, dan pembahasan hasil. Pengumpulan data dalam penyusunan KTTA ini akan menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan serta observasi. Selanjutnya, bab ini juga akan memaparkan mengenai gambaran umum dari PT Sarana Multi Infrastruktur yang memuat deskripsi, visi & misi, tugas dan fungsi maupun struktur organisasi dari DJPK maupun PT SMI. Pembahasan hasil berisi mengenai hasil tinjauan dalam literatur ilmiah yang menggambarkan pelaksanaan penerusan pinjaman yang dilakukan oleh PT SMI dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. Pembahasan tersebut terdiri atas kesesuaian kebijakan pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020, pengaruh pinjaman PEN daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2020 ke PT SMI, serta kelancaran proses pengembalian dari PT SMI kepada pemerintah tahun 2020.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan menyimpulkan hasil analisis penulis terkait pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran yang diusulkan oleh penulis kepada pemerintah pusat maupun PT SMI.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN